

KOTA DAN KAMPUNG KOTA DI ERA GLOBALISASI

Jo Santoso
Urban Laboratory
Graduate Program in Urban & Real Estate
Development
Universitas Tarumanagara

Globalisasi versus Urbanisasi 1

- Untuk mengantisipasi Urbanisasi Kota harus membangun Human Settlement terutama sebagai Habitat baru bagi para migran yang terus mengalir masuk ke kota.
- Proses Globalisasi masuk ke kota dengan tujuan melakukan restrukturisasi kota dengan tujuan mengintegrasikannya ke Pasar Global dan menjadikan kota bagian dari Sistem Ekonomi Global

Urbanisasi Versus Globalisasi di Jakarta



Apa itu Kota

- Kota dilihat dari perannya dalam pengembangan peradaban adalah sebuah Human Settlement.
- Dalam pengertiannya sebagai POLIS, Kota adalah sebuah kesatuan ekologis sekaligus kesatuan politis
- Tetapi dalam perjalanannya Kota berperan lebih dari pada sebagai Human Habitat.

City, Citizen and Civilization

- Sebagai kesatuan
- Citizen berdaulat terhadap kota mereka

GLOBALISASI

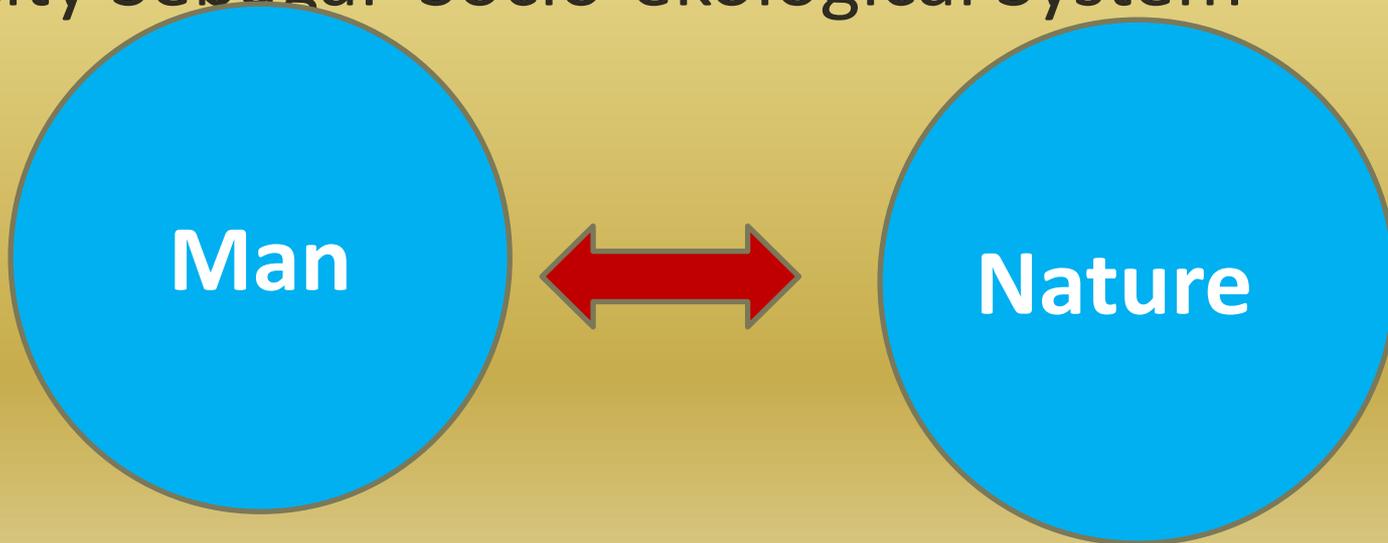
- Globalisasi Sebagai Konsekuensi Dari Konsep Peradaban Barat - Kapitalistis
- Interpretasi “Kemajuan” Dari Sudut Peradaban Barat
- Globalisasi mencegah terjadinya perang dunia ke-III

Diskonten Dari Globalisasi

- Globalisasi tidak menyelesaikan masalah kemiskinan
- Globalisasi tidak menyelesaikan masalah ketidakadilan
- Globalisasi tidak bisa memecahkan masalah climate change

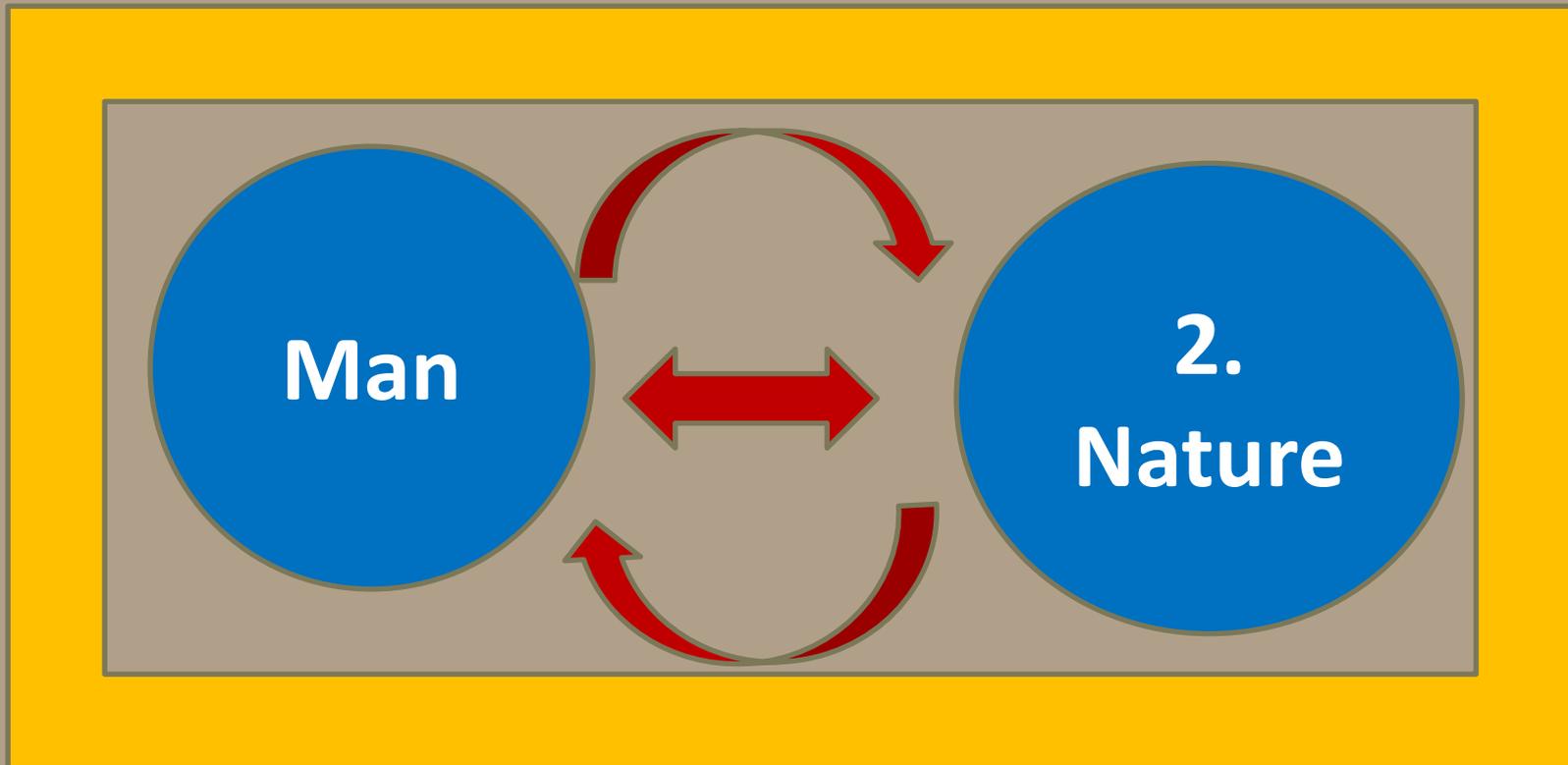
Urbanisasi: Kota Sebagai Human Habitat

- Pembentukan Artificial Environment through transformation part of the nature to living environment
- City Sebagai Socio-ekological System



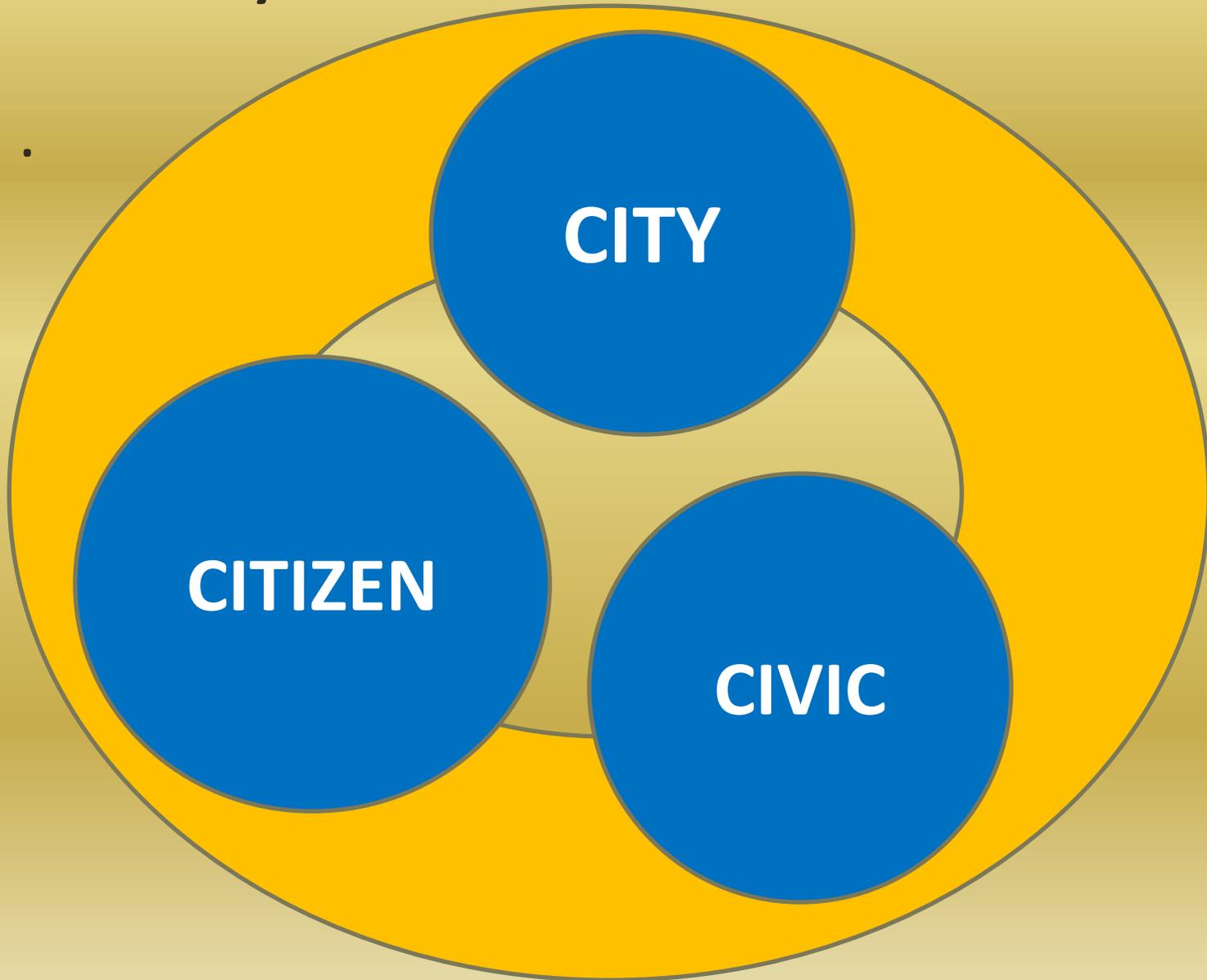
Every Civilization Is In Fact An Urban Civilization

To integrate part of the (2.) nature to living environment and to exclude the “wild” (1.) nature outside

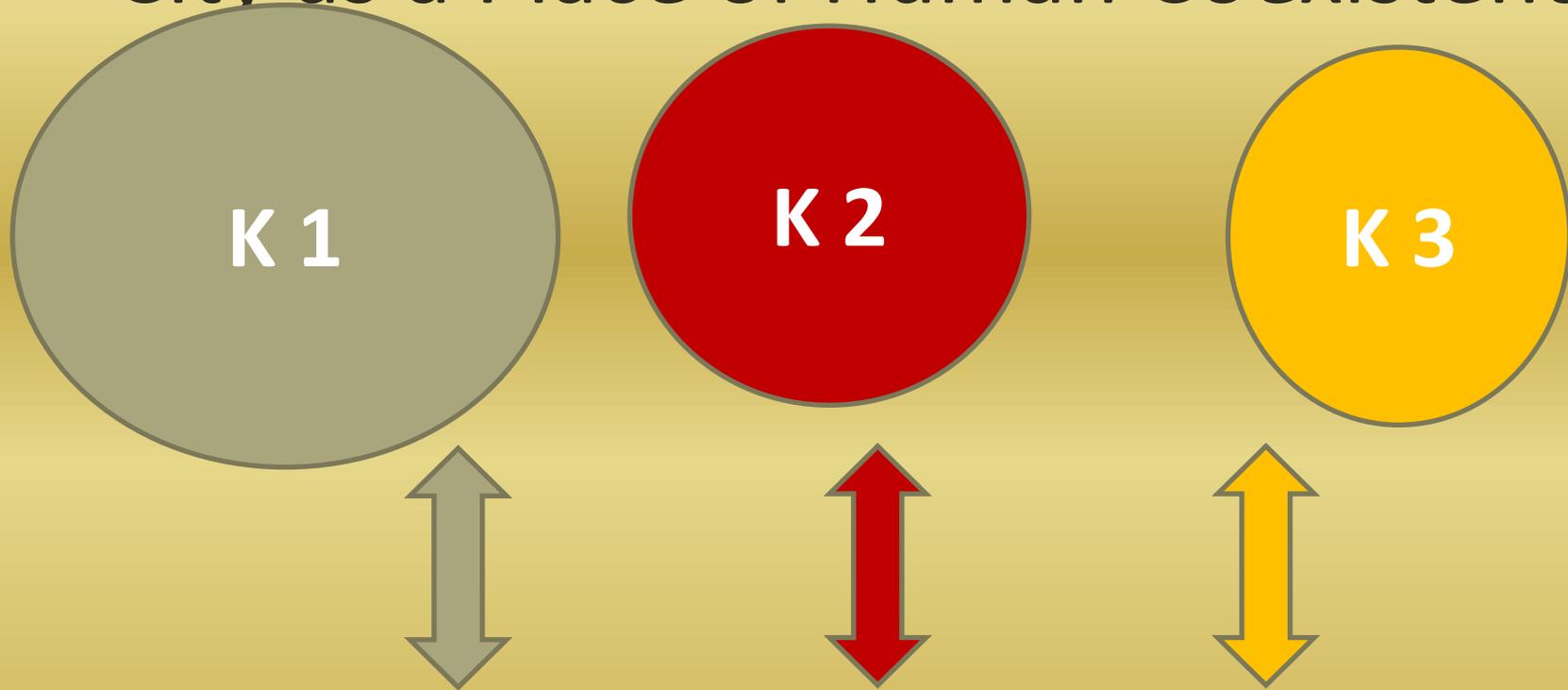


The City as a Product of Civilization

-
- .



City as a Place of Human Coexistence



consensus between different groups of citizen

**artificial
environment**

Transformasi dan Adaptasi

- Transformasi karena Urbanisasi
- Globalisasi Mentransformasi
 - Sistem Kota-Kota Nasional
 - Sistem socio-ekologis hinterland – Kota
 - Sistem sosio-kultural di dalam Kota

Kuatnya proses transformasi menyebabkan sistem lokal berada pada posisi defensif tetapi tetap mencoba menciptakan keseimbangan Baru antara sistem baru dan sistem lokal yang telah beradaptasi

Kenapa kampung kota tetap ada

- Proses transformasi dan adaptasi yang berjalan paralel
- Sistem lama tidak seluruhnya ditransformasi menjadi sistem baru
- Lokal lama menjadi lokal baru
- Tradisi lama menjadi tradisi baru
- Semua terjadi karena globalisasi adalah “benda asing” bagi kultur kita.

Kedudukan Kota di Era Nasionalisme

- Wealth of Nation (Adam Smith) ide bahwa kemakmuran bisa dicapai melalui intervensi negara.
- Negara sebagai “single artificial eco system” (?)
- City di adopsi oleh ide nasionalisme dikawinkan dengan ide “Welfare State”
- Kota terutama ibukota sebagai identitas sebuah negara

Kota di Era Globalisasi Sebagai Instrumen Negara

- Kondisi kota menentukan daya saing
- Perbaikan peningkatan daya saing kota menjadi program pembangunan kota nasional
- Kota dibajak dari penduduknya dan dijadikan instrumen negara untuk mengantisipasi globalisasi.
- Negara membuat program-program untuk mengatasi dampak buruk dari program nasional yang berorientasi pada peningkatan daya saing kota.

Sejarah Jakarta

- 1525 Jakarta didirikan oleh Kerajaan Demak untuk substitusi Malaka yg direbut Portugis
- 1619 Batavia didirikan oleh JP Coen menggantikan Ternate sebagai Headquarter VOC
- Batavia sebagai Tanah Air para Kolonialist
- Jakarta sebagai the modern capital of the new borned Nation Indonesia
- Jakarta sebagai “Spasial fix” Global capital, Agent of Global Power, Consuming city

Transformasi versus Adaptasi

- Globalisasi ingin mentransfer Jakarta dan kota-kota lain dan mengintegrasikannya menjadi bagian dari the global system of cities.
- Proses adaptasi berjalan paralel karena transformasi menciptakan diskrepansi sosial dan memproduksi proses marginalisasi.
- System lokal diperlukan untuk survive, mengamankan kepentingan mereka yang tidak terintegrasi dan mereka yang termarginalisasi

Potensi Benturan 1:

Antara kepentingan global dan lokal

- Kepentingan global hampir identis dengan kepentingan nasional yang berorientasi pada “development” (penganut developmentalist)
- Developmentalist cenderung menganggap kultur lokal menghambat transformasi karena itu Lee Kwan Yew membumihanguskan trad settlement dan memindahkan penghuninya ke rumah susun di kota baru.(cultural suicide)
- System lokal bertumpu pada kebutuhan mengembangkan sistem sosial kultural lokal yang berbasis pada ekonomi rakyat dan satuan-satuan sosio-ekologis lokal.

Potensi Benturan 2: Siapa yang Berdaulat

- Misalnya siapa yang berdaulat terhadap Penggunaan Tanah Perkotaan. Konflik tanah atau penguasaan tanah terjadi karena :
- Adanya dualisme antara Konstitusi yang mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat tapi kenyataan bahwa pemerintah beraksi sebagai “Superbody” (Kota hanya eksis sebagai subsistem pemerintahan)
- Hak Atas Tanah diprioritaskan kepada Mereka yang berani membayar tanah lebih tinggi yaitu para pengusaha, yang memfungsikan tanah sebagai modal kerja.

Potensi Benturan 3:

- Program Pemerintah Kota setelah di setujui oleh DPRD dilaksanakan dengan pengertian bahwa pelaksanaannya adalah demi kepentingan umum.
- Kenyataannya program itu hanya sah secara politis dan secara keuangan pada level kota.
- Existensi Komunitas terutama dari aspek sosio-ekologis, segi ekonomi rakyat dan secara keadilan sosial tidak bisa diabaikan dengan argumen mereka minoritas.

Potensi benturan (3)

- Proses penyusunan rencana pembangunan dimana eksekutif sebagai satu-satunya yang mempunyai wewenang memutuskan.
- Legitimasi oleh DPR (D) berdimensi politis dan keuangan dianggap legitimasi absolut.
- Interes komunitas dianggap menghambat krn hak komunitas untuk berpartisipasi pada proses pembuatan rencana tidak diatur

Potensi Benturan 4:

Pemberian Hak Atas Tanah

- Konstitusi tidak mengatur bagaimana masyarakat sebagai komunitas kota bisa mempertahankan kedaulatannya dalam proses transformasi dan pembangunan kota.
- Mekanisme perpindahan Hak Atas Tanah berlangsung “secara musyawarah” yang pada prakteknya jatuh kepada mereka yang bisa membayar paling tinggi.
- Mereka yang membayar paling tinggi adalah mereka yang melakukan kegiatan komersial di atas tanah tersebut.

Dominasi dari Sektor Privat Dalam Pengembangan Kota



24.01.2022

Urbanisierungsprozess im Kontext der
Globalisierung - Jakarta - zur Frage der
kulturellen Vielfalt und
Selbstbestimmung

Potensi Benturan 4: Distribusi Tanah Perkotaan

- Jadi bila semua tanah perkotaan menjadi komoditi maka tanah tidak akan tersedia untuk kebutuhan komunitas melakukan kegiatan sosial dan kultural.
- Bagi mereka yang tidak bisa membayar harga tanah yang tinggim mereka tidak akan bisa mendapatkan tanah yang diperlukan untuk membangun rumah.

Potensi Benturan (5):Mengatas namakan Kepentingan Umum

- Kalau terjadi benturan kepentingan nasional/ kota dengan kepentingan komunitas,
- Kepentingan komunitas selalu dikalahkan dengan argumen pemerintah mewakili kepentingan umum.
- Pemerintah secara sepihak menentukan yang dinamakan kepentingan umum kecuali bahwa itu sudah legal secara politis dan keuangan.

Potensi Benturan 6 :

Evaluasi Kinerja Pemerintah

- Apa kriteria bahwa sebuah program pembangunan sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan benar.
- Siapa yang berhak mengevaluasi bahwa pemerintah sudah menyusun perencanaan dengan benar
- Siapa yang berhak mengevaluasi bahwa pemerintah sudah melaksanakan program pembangunan dengan benar
- Siapa yang berhak mengevaluasi bahwa pemerintah telah mengelola dampaknya dengan benar.
- Kalau semua itu tidak pernah dilakukan, bagaimana kita bisa mengukur kinerja pemerintah pada tingkat nasional maupun daerah.

Sistem Administrasi Negara

- Sistem Administrasi Negara tidak mengatur apa yang harus dilakukan kalau terjadi benturan antara kelompok warga dan antara kelompok warga dan pemerintah.
- Sistem administrasi negara harus mengatur distribusi sumberdaya perkotaan secara adil kepada semua kelompok masyarakat yang memerlukan.
- Sistem administrasi negara harus menjaga jangan terjadi monopoli tanah atau sumber daya perkotaan lainnya (air!) oleh pemerintah dan dunia usaha.
- Sistem pengontrolan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Administrasi Negara: Distribusi Sumberdaya Perkotaan

- Tanah dibutuhkan untuk membangun Human Habitat dalam rangka mengantisipasi urbanisasi.
- Tanah diperlukan untuk menjaga fungsi kota sebagai Institusi Sosial, Pusat Kegiatan Kultural dan menjaga keseimbangan ekologis.
- Diperlukan Undang-undang yang menetapkan prinsip-prinsip dasar distribusi sumberdaya kota
- Diperlukan Undang-undang yang mengatur penyediaan tanah untuk perumahan di area perkotaan dalam rangka mengantisipasi Urbanisasi.

Sistem Administrasi Negara:

Siapa yang Berwewenang Menyusun Perencanaan

- Siapa yang berhak merencanakan distribusi tanah perkotaan dan sumber daya yang lainnya (air, dana, dst.)
- Pemerintah adalah organ eksekutif, tidak memiliki kedaulatan untuk melakukan perencanaan.
- Legitimasi program pemerintah oleh keputusan DPRD adalah legitimasi secara politis dan anggaran
- Rencana Distribusi Sumberdaya perkotaan terkait dengan aspek ekonomi, ekologis dan sosial-budaya.
- Penyusunannya harus partisipatif, karena pemerintah tidak mempunyai mandat untuk mewakili kelompok masyarakat.

Undang-Undang Perkotaan dan Kota 1

1. Menetapkan bahwa kedaulatan atas Kota berada di tangan komunitas warga kota.
2. Legalitas Eksistensi kelompok komunitas warga, legislatif dan eksekutif.
3. Menetapkan prinsip-prinsip distribusi sumber daya perkotaan.
4. Menetapkan siapa yang berwenang menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasinya.

Undang-Undang Perkotaan dan Kota 2

5. Menetapkan prosedur penyusunan rencana pengembangan kota dilihat secara ekonomi kerakyatan, sistem sosio-ekologis, dan kepentingan sosial kultural, dan mengatur partisipasi komunitas warga secara berjenjang.
6. Menetapkan institusi yang menjalankan dan mengotrol hal-hal tersebut diatas, termasuk keterlibatan institusi diluar wilayah yurisdiksi kota.

Lapangan Kota Siena didepan Balai Kota: Setiap Komunitas Warga mempunyai Tempatnya dan berperan sebagai Subyek Berdaulat



Banten Akhir Abad ke-16.



Rapat ini biasa berlangsung di malam hari, semua peserta mengambil tempat duduk berdasarkan kedudukannya di kota: Ditengah sebelah kanan Patih, Senapati dan Admiral diikuti para pengikut. Dan sebelah kiri para pemimpin komunitas kota, termasuk pemimpin kelompok orang asing

sekian

- Terima kasih